

Analisis Pendekatan *Trust Politic* Korea Selatan dalam Penyelesaian Hambatan Reunifikasi di Semenanjung Korea

Elpeni Fitrah

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

Email: elpeni.f@gmail.com

Zakie Andiko Ramadhani

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

Email: zakieandiko@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pendekatan *trust politic* Korea Selatan di bawah pemerintahan Park Geun Hye dalam menangani hambatan reunifikasi di Semenanjung Korea menurut perspektif konstruktivis. Terdapat tiga hambatan yang dihadapi oleh Korea Selatan dalam reunifikasi Korea yang mana tiga hambatan tersebut dipercayai oleh komunitas internasional sebagai hambatan utama reunifikasi kedua negara. Tiga hambatan tersebut adalah adanya perbedaan ideologi dan sistem antara Korea Selatan dan Korea Utara, provokasi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta program senjata nuklir Korea Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder melalui sumber dokumen/literatur dan menggunakan metode analisa eksplanasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan menggunakan perspektif konstruktivis tiga hambatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan hambatan dalam reunifikasi Korea di Semenanjung Korea. Dewasa ini, hambatan utama dalam reunifikasi Korea adalah adanya "krisis kepercayaan" dan perubahan identitas. Oleh karena itu, Korea Selatan menggunakan pendekatan *trust politic* dimana bertujuan untuk merubah struktur ketidakpercayaan dan konfrontasi diantara kedua negara, digantikan dengan struktur kepercayaan dan kerjasama. Perubahan struktur ini diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan reunifikasi di Semenanjung Korea diantara Korea Selatan dan Utara di masa depan.

Kata kunci: Identitas, Intersubjektifitas, Konstruktivis, Reunifikasi Korea, *Trust Politic*

Abstract

This research investigates on South Korea trust politic approach under Park Geun Hye administration to handle the challenges of Korean reunification in Korean Peninsula based constructivism perspective. There are third challenges that faced by South Korea within Korean reunification which is international community believed on these challenges. Those challenges are the differences of ideology and system between South and North Korea, South Korea and United States of America military provocation, and North Korea's nuclear weapon program. The type of this research is qualitative research that used secondary data by desk research approach and also using explanation methods to analyse the topic. Based on the result of this research, by using constructivism perspective those problems are not relevan more as barrier for Korean reunification in Korean peninsula. Today, the main problem to Korean reunification is what researcher called with "trust deficit" and identity changed. So that's why South Korea used this kind approach where a structure of mistrust and confrontation is replaced by that of trust and cooperation. This structure changing is hoped to increase the possibility of reunification in Korean Peninsula between South and North Korea in the future.

Keywords : *Contractivism, Identity, Intersubjectivity, Korean Reunification, Trust Politic*

PENDAHULUAN

Artikel ini hendak membahas langkah kebijakan luar negeri era pemerintahan Presiden Park Geun Hye (2013-2017) dalam mengusahakan terwujudnya reunifikasi sebagai momentum perdamaian di Semenanjung Korea. Park tampak berkomitmen untuk meneruskan upaya para pendahulunya dalam merealisasikan unifikasi, denuklirisasi Korea Utara, serta penyelesaian permasalahan di Semenanjung Korea dengan membawa konsep baru yang disebut sebagai pendekatan “*trust politic*” (Cheon, 2013). Pendekatan ini hadir sebagai gagasan alternatif yang mengedepankan aspek non material yaitu *trust* (kepercayaan). Kebijakan ini menarik minat penulis untuk menguraikan motivasi, alasan, dan kepentingan dibalik perumusan kebijakan tersebut. Penulis menilai langkah ini merupakan satu keputusan cermat untuk menutup kelemahan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat tradisional. Istilah tradisional penulis gunakan untuk menyebut serangkaian kebijakan terdahulu yang lebih mengedepankan aspek material seperti konfrontasi militer, ekonomi, dan aliansi politik yang dianggap tidak mampu menyelesaikan hambatan dan permasalahan di Semenanjung Korea dengan tuntas. (Manyin, 2013; Jong-Chul Park, 2008; Glaser & Snyder, 2010).

Kebijakan *trust politic* merupakan strategi yang diluncurkan oleh Park Geun Hye dengan bersandar pada tiga pilar yaitu: penggetar/pertahanan yang kuat (*strong deterrence/defence*), diplomasi kepercayaan (*trust diplomacy*), dan proses membangun kepercayaan di wilayah Semenanjung Korea (*Korean peninsula trust process*) (Cheon, 2013). Gagasan ini pada dasarnya sangat dekat dengan perspektif konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini berdasarkan elemen inti ideasional yang terdapat dalam pendekatan konstruktivis seperti *intersubjective beliefs and ideas, conceptions and assumptions* yang secara luas tergambar pada masyarakat baik kepada individu, kelompok sosial, organi-

sasi serta pembuat kebijakan. Ide-ide merupakan konstruksi sosial yang dilakukan oleh individu melalui seperangkat kepercayaan (*belief*), prinsip-prinsip, sikap dan perilaku yang memberikan orientasi luas dalam perilaku dan kebijakan. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh Tannenwald (2005: 15) dalam (Jackson & Sorensen, 2006) yang menyatakan “*Ideas are mental constructs held by individuals, sets of distinctive beliefs, principles and attitudes that provide broad orientations for behaviour and policy*”.

Penulis berasumsi bahwa *Trust Politic* digunakan oleh Korea Selatan sebagai solusi penyelesaian konflik dan ketegangan di Semenanjung Korea sebagai akibat ketiadaan “kepercayaan” di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Oleh sebab itu, pendekatan ini diharapkan dapat mengubah identitas, persepsi dan struktur budaya anarki di Semenanjung Korea melalui proses perubahan dari kondisi *Lockean* (rival) menjadi kondisi *Kanntian* (teman) melalui *shared of knowledge, material resources* dan praktik – praktik antar negara Korea Selatan dan Korea Utara. Perubahan struktur tersebut akan meningkatkan rasa saling percaya di Semenanjung Korea sehingga mempermudah terjadinya reunifikasi Korea di masa depan.

Pembuktian hipotesis ini akan penulis jabarkan dalam uraian yang lebih rinci di bawah ini.

Pendekatan Teoritik dan Konsep

Konsep Trust Politic

Trust merupakan kata kunci kebijakan dan politik luar negeri pada era pemerintahan Park. Premis pertama pada konsep *trust politic* adalah secara tegas dalam menghadapi segala ancaman dan hambatan yang mengganggu perdamaian berdasarkan prinsip pertahanan yang kuat atau *strong defence principle*. Pada prinsip ini Presiden Park menegaskan tidak mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir dan akan mengerahkan segala usaha untuk melakukan negosiasi untuk

menghentikan kapabilitas pengembangan nuklir Korea Utara (Cheon, 2013).

Premis kedua adalah *trust diplomacy* yang menggambarkan suatu upaya untuk menciptakan hubungan dan kerja sama antar masyarakat global yang terhubung dengan prinsip kepercayaan. Park menegaskan pentingnya kepercayaan dalam hubungan internasional, dimana Korea Selatan mengharapkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual cooperation*) dan hubungan kedua negara berdasarkan kepercayaan yang saling menguntungkan (*mutual trust*)-(Cheon, 2013).

Premis ketiga dalam *trust politic* adalah adanya proses harmonisasi hubungan antar negara Korea (Seoul dan Pyongyang). Dasar filosofi politik kepercayaan atau *trust politic* diwujudkan dalam proses kepercayaan di Semenanjung Korea (*Korean Peninsula Trust Process*). Sebagai cara untuk membangun kepercayaan antara kedua negara, Korea Selatan melakukan tiga tahap sebagai *trust process* di antaranya adalah pertama, adanya bantuan kemanusiaan untuk masyarakat miskin dan terlantar di Korea Utara; kedua, pertukaran dan kerja sama antar kedua negara pada bidang sosial, ekonomi, budaya; ketiga, project Visi Korea (*Vision Korea Project*) untuk membangun dan mendirikan komunitas pasar tunggal di Semenanjung Korea. Pada tahap ketiga Visi Korea Project digunakan sebagai acuan dalam mengkondisikan akumulasi dan progres kepercayaan yang saling menguntungkan satu sama lain terutama dalam isu denuklirisasi Korea Utara (Cheon, 2013).

Perspektif Konstruktivis

Menurut Alexander Wendt (1999), terdapat tiga jenis interaksi dan kebiasaan perilaku antarnegara yang menggambarkan situasi politik internasional ditengah struktur dunia yang anarki. Tiga jenis interaksi tersebut adalah Hobessian, Lockean dan Kantian. Ketiga kondisi tersebut menjelaskan bagaimana suatu

negara memposisikan negaranya dalam sistem internasional dan negara lain, apakah sebagai “musuh”, “rival” ataupun “teman” sesuai dengan identitas yang mereka miliki. Jenis interkasi tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa segala sesuatu terkonstruksi secara sosial.

Beberapa premis yang terdapat di dalam pendekatan konstruktivis adalah sebagai berikut. *Pertama*, anarki bukanlah kondisi yang *given* (tiba-tiba ada) tapi merupakan kondisi yang dibentuk dan dikonstruksi oleh aktor itu sendiri. Itulah yang nanti akan menentukan apakah struktur internasional akan bersifat konfliktual atau kerjasama. *Kedua*, adanya prinsip fundamental pada konstruktivis yang percaya bahwa seorang aktor bertindak didasarkan kepada kepentingan dan persepsi aktor tersebut terhadap aktor lain dengan menyesuaikan pada yang mereka hadapi. Tetapi hal tersebut dapat berjalan tergantung kepada pemahaman intersubjektif dan ekspektasi terhadap *distribution of knowledge* (informasi mengenai aktor atau fenomena yang utuh), serta bagaimana membentuk persepsi terhadap dirinya sendiri atau aktor lain (Wendt, 1992).

Selain itu, konsep dasar identitas tidak dapat dilepaskan sebagai unsur penting paradigma konstruktivisme (Wendt, 1999). Gagasan mengenai konsep identitas dalam konstruktivisme akan banyak memengaruhi penulis dalam menganalisis kasus pada artikel ini. Setidaknya ada empat jenis identitas menurut Wendt (1999); Identitas personal; Identitas penggolongan; Identitas peran; dan Identitas kolektif. Identitas personal merujuk pada atribut yang membentuk eksistensi dirinya yang membedakan dengan aktor lain. Identitas ini dapat dicontohkan seperti sebuah negara yang memiliki karakteristik wilayah, lambang negara, dan lain lain yang dapat membedakan negara tersebut dengan negara lain.

Identitas penggolongan (*type identity*) merupakan derivasi dari identitas personal

yang bersifat intrinsik tanpa memerlukan definisi dari lingkungan eksternal, misal negara fasis, negara liberal. Artinya, terjadi penggolongan negara berdasarkan kelompok tertentu. Identitas peran (*role identity*) merupakan identitas yang berkenaan dengan tanggung jawab suatu negara ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan posisi suatu negara dalam percaturan politik internasional, dia membutuhkan aktor atau keberadaan negara lain (*significant other*). Terakhir, identitas kolektif merupakan identitas yang berasal dari kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor negara. Identitas ini menganut logika kelompok yang berlandaskan pada rasa solidaritas, dimana hal tersebut membutuhkan identifikasi positif yang menciptakan struktur pemahaman bersama yang mengikat mereka dalam satu identitas tunggal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode analisa eksplanatif dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen/ literatur. Penggunaan pendekatan dan metode ini bertujuan untuk memperoleh bahan dan data empiris yang diperoleh melalui jurnal maupun paper ilmiah, *report*, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) di antaranya yaitu, a) Pengumpulan data, berupa informasi yang diperoleh dari data primer maupun sekunder. Data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dari studi pustaka seperti dari buku, jurnal dokumen, laporan dan sumber internet; b) reduksi data, dalam artian membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data-data yang akan digunakan penulis adalah data-data yang secara spesifik dapat menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini; dan c) penyajian data berbentuk uraian yang menarasikan data-data berupa angka dan informasi untuk memperkuat argumen.

PEMBAHASAN

Permasalahan Reunifikasi

Segregasi bangsa Korea merupakan realita yang tidak pernah disengaja oleh bangsa Korea itu sendiri melainkan hasil pemaksaan oleh entitas di luar mereka (Hui, 2010: 8). Pembagian wilayah tersebut bertolak belakang dengan harapan dan keinginan bangsa Korea, justru pemisahan wilayah tersebut berasal dari keinginan dan kepentingan kekuatan besar dunia saat itu yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat membantu membangun negara demokratis yang sekarang disebut Korea Selatan (Republik Korea) pada tanggal 15 Agustus 1948. Sedangkan di pihak lain Uni Soviet membantu membangun negara komunis di wilayah yang mereka duduki yang kemudian dikenal sebagai Korea Utara pada tanggal 9 September 1948 (Suh, 2013).

Sejak Amerika Serikat dan Uni Soviet meninggalkan warisan dua negara di Semenanjung Korea, hal ini mengakibatkan terdapatnya dua identitas seperti bayi kembar yang memiliki kesamaan sejarah nenek moyang namun berbeda sifat dan tindakannya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan konsep identitas kedua dari konstruktivis yaitu identitas yang menggolongkan suatu negara kepada golongan tertentu (*type identity*). Identitas ini merupakan derivasi dari identitas personal (*corporate*) yang bersifat intrinsik tanpa memerlukan definisi dari lingkungan eksternal seperti penerapan ideologi, sistem

pemerintahan, misal negara fasis, negara liberal, komunis, dan lain lain.

Pembagian bangsa Korea telah menghasilkan perbedaan yang sangat besar di antara Korea Selatan dan Utara dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya dari yang sebelumnya homogen, baik dari sisi sejarah, budaya, bahasa dan tanah air. Setelah pemisahan bangsa Korea ini, di antara keduanya menghasilkan perbedaan ide-ide dan sistem politik baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Dengan alasan adanya perbedaan di antara keduanya memberikan konsekuensi kedua negara tersebut harus menjalani pola perkembangan dan pembangunan yang berbeda (Hui, 2010: 12). Perang Korea pada 1950-1953—dikenal juga dengan “*the forgotten war*”—semakin mempertajam ketegangan sekaligus memperdalam jurang pemisah dua negara Korea (Suh, 2013: 1). Akibatnya, kedua negara saling berlomba untuk membangun kekuatan militer (Sheongho, 2007).

Pembagian Korea ini juga membawa hubungan konfrontasi dan permusuhan di antara keduanya. Lebih lanjut lagi akibat dari terpisahnya Korea menjadi dua negara mengakibatkan ketidakpercayaan dan konfrontasi di antara kedua negara Korea semakin memburuk. Penguasa di wilayah Korea Selatan memandang teman sebangsanya di wilayah utara sebagai musuh utama (*the principal enemy*) dan menghukum tokoh-tokoh pro utara ke dalam hukum keamanan nasional (*national security law*) demikian juga dengan negara Korea Utara (Hui, 2010: 12). Sejak saat itu kedua negara meredefinisi identitas satu sama lain dari saudara menjadi musuh dan hal ini memiliki konsekuensi terhadap hubungan mereka di masa depan.

Masyarakat Korea sadar bahwa reunifikasi merupakan cita-cita besar mereka setelah berbagai konflik dan agresi yang terjadi di Semenanjung Korea. Namun selama kurang lebih memasuki enam dekade perpisahan diantara keduanya, reunifikasi belum tercipta hingga hari ini.

Hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan yang dianggap menjadi penghalang mereka untuk bersatu kembali. Terdapat tiga hambatan yang umumnya dipercayai oleh komunitas internasional. Hambatan ini menjadi faktor utama penghalang reunifikasi diantara mereka. Tiga hambatan tersebut yaitu adanya perbedaan ideologi dan sistem antara Korea Selatan dan Korea Utara, provokasi aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan program senjata nuklir Korea Utara (Jina, 2015: 3-4). Kebijakan *trust politic* Park Geun Hye pada titik ini seharusnya dapat menjadi terobosan dalam membangun harapan persatuan dan perdamaian di Semenanjung Korea.

***Trust Politic* sebagai Solusi Hambatan Reunifikasi Berdasarkan Perspektif Konstruktivis**

Masyarakat secara umum mempercayai bahwa terdapat beberapa hambatan utama yang menyebabkan reunifikasi belum tercipta di Semenanjung Korea. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan ideologi dan sistem, kedua adalah permasalahan nuklir Korea Utara, serta ketiga adalah adanya provokasi yang berasal dari aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Hambatan pertama adalah hambatan sistem dan perbedaan ideologi antar kedua negara. Sejak saat pembagian negara Korea menjadi dua negara, reunifikasi telah menjadi perhatian utama untuk kedua rezim penguasa Korea Selatan dan Korea Utara. Sejak tahun 1972, Korea Selatan dan Korea Utara sudah memulai untuk mengupayakan terjadinya reunifikasi di Semenanjung Korea. Pada saat itu pemimpin kedua negara yaitu Kim II Sung dari Korea Utara dan Park Chung Hee dari Korea Selatan mengadakan pertemuan membahas reunifikasi. Pertemuan ini menghasilkan dokumen yang disebut *July 4 North and South Joint Statement*. Dokumen ini berisikan prinsip-prinsip

yang harus dilaksanakan oleh kedua negara untuk mengupayakan reunifikasi (Suh, 2013: 2). Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh kedua negara Korea tersebut adalah pertama, reunifikasi dapat dicapai melalui upaya sendiri oleh pihak terkait tanpa campur tangan atau intervensi pihak lain; kedua, reunifikasi dapat dicapai melalui cara damai, tanpa menggunakan (paksaan) kekuatan bersenjata satu dengan yang lain; ketiga, pesatuan nasional serta adanya masyarakat yang homogen, harus diupayakan sebagai prioritas utama dibandingkan perbedaan ide, ideologi dan sistem (Jin, 1976). Hal tersebut diharapkan dapat menjaga ketenteraman di Semenanjung Korea serta sebagai sarana untuk meningkatkan atmosfer kepercayaan yang saling menguntungkan (*mutual trust*), kemudian kedua negara juga mengupayakan adanya pertukaran di berbagai bidang untuk mengembalikan identitas nasional Korea di antara kedua negara, kesepahaman yang saling menguntungkan (*mutual understanding*) untuk menciptakan reunifikasi yang damai (Suh, 2013: 3).

Hambatan kedua dan ketiga terhadap reunifikasi di Semenanjung Korea adalah adanya provokasi aliansi militer dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta adanya pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Ketegangan di Semenanjung Korea selalu meningkat pasca percobaan senjata nuklir Korea Utara yang ketiga pada tanggal 12 Februari 2013. Dalam perkembangannya percobaan nuklir Korea Utara telah mengalami enam kali uji percobaan nuklir yaitu pada tahun 2006 sebanyak 2 kali percobaan, 2013, 2015, dan uji coba nuklir kelima pada tahun 2016. Sejak uji coba nuklir yang ketiga Korea Utara mengklaim bahwa program pengembangan senjata nuklir tidak dapat dinegosiasikan dan Korea Utara akan bertahan untuk tetap mengembangkan program nuklir tersebut (Choi, 2013; Tempo, 2017).

Seperti yang dilaporkan pada portal berita internasional (CNN) Korea Utara

menjabarkan persyaratan agar Washington dan Seoul mengakhiri latihan militer mereka sebagai syarat Korea Utara menghentikan uji coba nuklir mereka. Persyaratan tersebut didukung oleh pernyataan kementerian luar negeri Korea Utara pada sebuah berita yang menyatakan akan menghentikan uji coba nuklir apabila Amerika Serikat dan Korea Selatan menghentikan latihan militernya di Semenanjung Korea. Pernyataan tersebut lalu direspon oleh Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan menolak ajakan Korea Utara untuk mengakhiri pelatihan militer di Semenanjung Korea dengan Korea Selatan dikarenakan Korea Utara dianggap belum memiliki kredibilitas internasional untuk menepati janji tersebut (CNN, 2016).

Korea Utara tidak memiliki kredibilitas di mata komunitas internasional dikarenakan mendapatkan *labelling* sebagai negara yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dipercaya. Labelling tersebut muncul dari praktik-praktik Korea Utara yang selalu melanggar perjanjian. Pada saat itu Korea Utara sedang berusaha memulihkan keadaan ekonomi domestiknya melalui rekonsiliasi dengan komunitas internasional termasuk di dalamnya Amerika Serikat (Jina, 2015: 4).

Sejak tahun 1995, Amerika Serikat telah menyediakan lebih dari satu juta dollar bantuan asing untuk Korea Utara. Sekitar 60% merupakan bantuan makanan seperti jagung, kedelai, minyak sayur, makanan herbal cepat saji dan 40% bantuan energi (Manyin, 2005). Namun semua itu diharapkan dapat membawa Korea Utara menghentikan program nuklir dan provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara, hingga pada akhirnya Korea Utara kembali melakukan provokasi dengan uji test nuklirnya hingga mendapatkan respon dari komunitas internasional seperti China, hingga PBB untuk memperkuat sanksi kepada Korea Utara (Jina, 2015).

Penulis berpendapat bahwa akar permasalahan fundamental yang selama ini

menjadi penghambat reunifikasi di Semenanjung Korea adalah adanya masalah ketidakpercayaan. Perang sejak tahun 1950 hingga tahun 1953 sejatinya telah berakhir pada saat itu. Namun, perubahan identitas dan ketidakpercayaan memberikan persepsi yang berbeda kepada Korea Selatan dan Korea Utara. Ketidakpercayaan menghasilkan konstruksi bahwa masing-masing pihak merasakan ketidakamanan dan kekhawatiran bahwa pihak lain akan bertindak di luar harapan mereka, yaitu segala tindakan dimaksudkan untuk mengancam dan menyerang masing-masing pihak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh menteri luar negeri Korea Selatan, He Yun Byung-se dalam pidatonya saat menghadiri acara Chatam House¹ di London pada 24 Desember 2014. Dia mengatakan bahwa kendala utama dalam reunifikasi di Semenanjung Korea adalah kurangnya kepercayaan antarpihak yang memiliki kepentingan, terutama negara-negara di wilayah Asia Timur, termasuk Korea Utara. Berikut kutipan pidatonya:

"...Here one fundamental problem is what I call the 'trust deficit'. This deep-rooted mistrust can easily escalate into real conflict ... so my government intends to foster a regional environment where a structure of mistrust and confrontation is replaced by that of trust and cooperation forming virtuous cycles throughout the region" (Se, 2014).

Sesuai dengan kutipan pernyataan di atas, Korea Selatan berusaha untuk merubah struktur anarki internasional yang telah ada dari konflik menuju kerjasama. Dalam hal ini, Korea Selatan mencoba mempersepsikan dirinya sebagai

¹ Chatam House, Royal Institute of International Affairs, adalah lembaga swadaya masyarakat nirlaba yang berpusat di London. Lembaga ini meneliti dan mengutamakan pemahaman isu-isu yang berkaitan dengan politik internasional dan peristiwa internasional terkini. Lebih lanjut dapat dilihat pada <http://www.chathamhouse.org>.

teman, saudara dan satu bangsa Korea dengan mengedepankan kepercayaan dan kerjasama dalam hubungannya dengan Korea Utara dan negara lain. Melalui pendekatan *trust politic* Korea Selatan diharapkan dapat membangun kepercayaan Korea Utara terhadap Korea Selatan dan komunitas internasional terutama untuk menghilangkan identitas Korea Utara sebagai negara yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diprediksi.

Ketegangan keamanan dan provokasi militer yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan dampak yang ditimbulkan dari struktur sosial intersubjektif di antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Korea Utara. Realita tersebut terjadi ketika negara-negara tidak memiliki kepercayaan (*distrust*) sehingga muncul kecurigaan satu dengan yang lain dalam menerjemahkan keadaan yang ada dan ketidaktahuan masing-masing aktor dalam memahami maksud dan tujuan aktor lain (Wendt, 1992: 73). Ketegangan di Semenanjung Korea berasal dari persepsi Korea Selatan yang menganggap bahwa kepemilikan dan percobaan senjata nuklir Korea Utara sebagai ancaman yang mungkin akan menyerang negaranya. Argumentasi pandangan realis mungkin percaya bahwa keberadaan senjata nuklir mampu menjamin perdamaian karena tidak mungkin senjata tersebut akan digunakan (Waltz, 1990).

Pendekatan konstruktivis memandang bahwa motivasi kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara berasal dari persepsi tentang tindakan yang pantas dilakukan. Dalam pendekatan konstruktivis senjata nuklir mempunyai fungsi simbolik yang mempresentasikan persepsi pemimpin negara atas perilaku yang dianggap pantas dan modern (Sagan, 1996-1997). Negara berambisi memproduksi senjata nuklir bukan semata-mata karena alat penjamin keamanan nasional, tetapi karena nilai sosial yang dikandungnya.

Motivasi Korea Utara memiliki senjata nuklir adalah untuk mempertahankan

identitasnya sebagai negara nuklir. Ambisi Korea Utara tersebut memerlukan *significant other* yaitu negara barat seperti Amerika Serikat yang dianggap sebagai musuh serta adanya Korea Selatan yang masih dianggap sebagai rival negaranya. Berkaitan dengan hal tersebut Korea Selatan melalui pendekatan *trust politic* terdapat prinsip pertahanan yang kuat atau *strong defence principle*. Pada prinsip ini Presiden Park menegaskan tidak mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir dan akan mengerahkan segala usaha untuk melakukan negosiasi untuk menghentikan kapabilitas pengembangan nuklir Korea Utara (Cheon, 2013). Hal tersebut membuktikan bahwa praktik-praktik percobaan nuklir Korea Utara bukanlah untuk menyerang negara Korea Selatan namun untuk mencari pengakuan identitas sebagai negara nuklir.

Di pihak lain, Korea Utara juga tidak memiliki kepercayaan (*distrust*) sehingga muncul kecurigaan kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan aktifitas latihan militer kedua negara di Semenanjung Korea. Latihan militer antara angkatan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dianggap sebagai praktik-praktik yang mengancam bagi Korea Utara. Mungkin bagi pandangan realis memandang bahwa pelatihan aliansi militer Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan respon atas adanya ancaman yang mengharuskan kedua negara untuk saling berlomba memperkuat kekuatan militer (*balance of power*) untuk menandingi kekuatan nuklir negara Korea Utara.

Konstruktivis memandang bahwa motivasi negara Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan aliansi militer bersama adalah dikarenakan adanya identitas kolektif. Identitas kolektif muncul ketika negara-negara saling mempersepsikan diri sebagai "teman". Artinya ada identifikasi positif di antara mereka sehingga hubungan internasional dibentuk oleh logika pertemanan (*amity*)

(Rosyidin, 2015: 59). Maka aliansi militer diantara kedua negara bukan semata-mata untuk menandingi kekuatan nuklir Korea Utara namun karena adanya perasaan dan identitas kolektif. Menurut penulis tingkat ketergantungan dan kesamaan nilai ideologi dan sebagai negara demokratis serta pencipta perdamaian antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan *building block* yang membangun identitas kolektif.

Perubahan identitas dan realitas sosial sangat mungkin berubah dalam hubungan internasional. Identitas dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan adanya aktor yang memanipulasi suatu keadaan hingga merubah identitas dirinya dan aktor lain (Wendt, 1999: 21). Masing-masing atribut melahirkan kepentingan yang berbeda pula, ragam identitas seperti itu disebut sebagai identitas subjektif. Identitas saudara sedarah ditunjukkan oleh Korea Selatan saat Korea Utara mengalami keadaan yang sangat krusial seperti adanya sanksi ekonomi. Anomali terlihat pada respon dari Korea Selatan yang tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara saat mayoritas negara-negara di dunia menghentikan arus perdagangan dan bantuan kepada Korea Utara. Seperti yang dilansir oleh portal berita Okezone News pada tanggal 22 September 2017, meskipun Korea Selatan mengecam adanya uji coba nuklir Korea Utara, pemerintah Korea Selatan tetap melanjutkan rencana pengiriman bantuan kemanusiaan sebesar 106 miliar rupiah melalui badan-badan PBB untuk warga Korea Utara (Putri Ainur Islam, 2017).

Sedangkan identitas rival atau musuh terlihat ketika Korea Selatan berada pada situasi terancam terutama pada lingkungan komunitas internasional. Korea Selatan akan lebih agresif ketika berada di depan komunitas internasional seperti mendukung adanya sanksi ekonomi kepada Korea Utara dan bertindak tegas apabila Korea Utara melakukan percobaan nuklir di negaranya. Hal ini merupakan penerapan

strong defence and deterrence dari *trust politic*. Park berpendapat bahwa provokasi dari Korea Utara masih perlu dipertimbangkan dan Korea Selatan selalu siap untuk melakukan perundingan dan negosiasi dengan Kim Jong Un apabila menunjukkan keinginan yang serius untuk memulai negosiasi (Tatar, 2013).

Menurut penulis Korea Selatan melalui praktik-praktiknya mencoba mengubah kondisi hubungan antara Korea Utara yang berada dalam sistem *self help*. Dimana mereka cenderung menghasilkan kompetisi kekuatan militer, keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) dan perang menuju ke sistem yang lebih damai yang bernuansa kepercayaan dan kerjasama. Salah satu praktik yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah dengan membangun taman perdamaian dunia di DMZ (*DMZ World Peace Park*) (MoU, 2013: 19). Pemerintah Korea Selatan telah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara yang relevan termasuk Korea Utara untuk membuat taman perdamaian di zona demiliterisasi. Oleh karena itu, *DMZ World Peace Park* diharapkan menjadi sebuah *landmark* perdamaian dunia, sebagai sebuah model baru untuk perdamaian dan kerjasama yang membawa kebersamaan antara kedua negara Korea dengan komunitas internasional (MoU, 2013: 19).

Pendekatan konstruktivis mempercayai bahwa konstruksi sosial adalah proses dimana agen dan institusi mengalami pembentukan ulang secara terus-menerus. Hubungan sosial mengalami perubahan atau tidak berubah mana kala kita menghendakinya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Geun Hye sejak tahun 2013-2017 mencoba untuk menghendaki adanya perubahan struktur sosial di dalam hubungan antar negara Korea Utara dan komunitas internasional.

Walaupun Park Geun Hye tidak dapat menyelesaikan jabatannya sebagai Presi-

den Korea Selatan karena menjadi tersangka korupsi. Namun terdapat beberapa pencapaian selama pemerintahannya yaitu penenggelaman kapal laut Cheonan dan permasalahan pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 tidak terjadi lagi, pada aspek ekonomi dan kemanusiaan terdapat pencapaian dalam normalisasi kompleks industri Kaesong yang sebelumnya telah bangkrut, adanya keberlanjutan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara melalui organisasi kesehatan dunia (WHO), badan program pangan dunia (*World Food Programme*) dan UNICEF untuk menghindari politisasi masalah kemanusiaan, serta terciptanya taman perdamaian di DMZ.

Penulis menemukan fakta bahwa hambatan denuklirisasi Korea Utara dan provokasi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan sudah tidak relevan lagi. Fakta tersebut dibuktikan dengan kemampuan kedua pihak menghentikan kedua praktik-praktiknya tersebut selama pagelaran olimpiade di Pyeonchang tahun 2018. Dimana kekhawatiran salah satu pihak akan melakukan penyerangan ketika salah satu pihak menghentikan praktik militernya tidak terbukti sama sekali pada saat itu. Namun, terdapat fakta yang unik dimana kedua negara Korea hanya menggunakan satu bendera yang melambangkan reunifikasi kedua negara selama pagelaran olimpiade Pyeonchang tahun 2018. Oleh karena itu, identitas kolektif sebagai satu bangsa dapat menjadi prioritas utama bagi kedua negara.

Menurut penulis, *trust politic* merupakan pendekatan yang cukup efektif dalam mengatasi hambatan reunifikasi di Semenanjung Korea. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa sejarah presiden Korea Utara Kim Jong Un melintasi DMZ untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin Korea Selatan pada tanggal 27 April 2018. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendeklarasikan perdamaian di antara kedua negara.

KESIMPULAN

Seandainya Korea Selatan percaya bahwa Korea Utara sangatlah mungkin bertindak agresif, seharusnya Korea Selatan juga mempercayai bahwa Korea Utara mungkin untuk bertindak kooperatif. Maka kepercayaan merupakan hakikat manusia yang tertanam dalam karakteristik suatu negara dan itulah yang dipercayai oleh konstruktivis. Dalam situasi dimana negara bersifat agresif, hubungan sangat cepat mengarah kepada bentuk ketakutan, kehilangan kepercayaan dan ancaman. Tetapi ketika Korea Selatan menggunakan *trust politic* dan menganggap masalah yang sebenarnya adalah kehilangan kepercayaan.

Maka dari berbagai penjelasan yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi Korea Selatan menggunakan pendekatan *trust politic*, pada saat

pemerintahan Presiden Park Geun Hye karena adanya hambatan kepercayaan dalam melakukan tahapan-tahapan reunifikasi. Melalui pendekatan ini pemerintah Korea Selatan berharap dapat mengakhiri konfrontasi dan provokasi yang ada di Semenanjung Korea. Pendekatan *trust politic* dianggap sebagai kunci perubahan identitas dan mengubah pola hubungan diantara mereka. Pola hubungan konfliktual diharapkan dapat berubah menjadi pola kerjasama yang berlandaskan kepercayaan diantara kedua pihak. Apabila pola tersebut berhasil dilakukan oleh Korea Selatan melalui pendekatan *trust politic* maka perubahan struktur tersebut akan meningkatkan rasa saling percaya di Semenanjung Korea sehingga mempermudah mencapai situasi yang damai serta meningkatkan kemungkinan terjadinya reunifikasi Korea di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Cheon, S. (2013). *Trust - The Underlying Philosophy of The Park Geun Hye Administration*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Coulter, J. (1982). Remarks on the Conceptualization of Social Structure. *Philosophy of the Social Sciences*(12), 42-43.
- Hui, M. T. (2010). *Reunification of Koreas A Major Security Issue on The Korean Peninsula: The North Korean Perspective*. Singapura: Institute for Security and Development Policy.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jin, K. S. (1976). *Korean Unification: Source Materials with an Introduction*. Seoul: Research Center for Peace and Unification.
- Jina, K. (2015). Source and Objectives of North Korea Foreign Policy : Identity, Values, and Negotiating Behaviour. (C.-C. C. Utpal Vyas, Penyunt.) *North Korea Crisis and Regional Responses*, 3-19.
- Kim, C. H., & Lee, W. (2016). North Korea's responses to the trust-building on the Korean peninsula and future tasks. *Journal of Asian Public Policy*, 1-16.
- Lee, S. H. (2010). A New Paradigm for Trust Building on the Korean Peninsula: Turning Korea's DMZ into a UNESCO World Heritage Site. *Asia Public Journal - Japan Focus*, 8(35).
- Manyin, M. E. (2005). *Foreign Assistance for North Korea*. CRS Report for Congress.
- Ouellette, Dean J. (2013, December). *Building Trust in Inter-Korean Relations: A Role for Renewable Energy?*, 11(2), 327-353.
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas : Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sagan, S. D. (1996-1997). Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Model

- in Search of a Bomb. *International Security*, 21(3), 54-86.
- Se, H. Y. (2014). *Security on the Korean Peninsula*. Minister of Foreign Affairs, Republic of Korea. London: Chatam House The Royal Institute of International Affairs.
- Sorensen, R. J. (2014). Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima. Dalam R. J. Sorensen, *Introduction to International Relations, Fifth Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stryker, S. (1987). The Vitalization of Symbolic Interactionism. *Social Psychology Quarterly* (50), 93.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suh, M. B. (2013). *A Tale of Two Koreas : Breaking the Vicious Circle*.
- Tatar, J. S. (2013). *The New South Korean President's Foreign Policy Directions*. Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, The Polish Institute of International Affairs . Warsawa, Poland: Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych (PISM).
- Waltz, K. (1990, September). Nuclear Myth and Political Realities. *American Political Review*, 84(3), 731-745.
- Weber, L. R., & Carter, A. I. (2003). *The Social Construction of Trust, The Analysis of Social Problems* (1 ed.). New York: Springer US.
- Wendt, A. (1992). Social Anarchy What States Make of It: The Social Construction of Power Politic. *International Organization*, 46, 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Artikel Daring**
- Ministry of Unification (MoU). (2013, September 23). *Trust Building Process on the Korean Peninsula*. Diakses dari <<http://eng.unikorea.go.kr>>.
- Putri Ainur Islam, O. Z. (2017, September 22). *Okezone News*. Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2017/09/22/18/1780711/mulai-meski-bersitegang-korsel-tetap-beribantuan-kemanusiaan-kepada-warga-korut>.
- Sindonews.com. (2018, Januari 26). *Korsel - AS Kembali Gelar Latihan Militer Gabungan Pasca Olimpiade*. Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1276952/40/korsel-as-kembali-gelar-latihan-militer-gabungan-pasca-olimpiade=1516957560>.